KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK			H.1	H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 1 3 6 5 H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan				H.4 X Final	
				H.2 Pellibetulali Re- 0 11.5 Trellibutululi				H.5 Tidak Final	
A. IDEN	ITITAS PE	NERIMA PENGHASILA	N YANG	DIPOTONG					
A.1 NPWP : 6 4 3 4 2 8 7 0 9 7 2 2 0 0 0									
A.2 NIK :									
A.3 Naı	ma :	MUHAMMAD ZU	LKIFLI						
B. PPh	PASAL 21	YANG DIPOTONG							
MASA PAJAK (mm-yyyy)		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)		DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
	B.1	B.2		B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
	4	21-402-01		574.000	574.000	0	5	28.700	
					bebankan kepada APBN atau	APBD yang Dite	rima oleh PN	S, Anggota	
B.8 D	Servanion Noticino.								
_	Nama Dokumen Biaya Pembayaran Tanggal 1 3 dd 0 4 mm 2 0 2 2 уууу								
3.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.									
Nomor: Tanggal dd mm									
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :									
B.11 _	PPh y	ang dipotong/dipungut y	ang diber	ikan fasilitas PPh berda	asarkan :				
C. IDEI	NTITAS PE	MOTONG PAJAK							
C.1 NPWP Instansi Pemerintah : 9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0									
C.2	Nama Instansi Pemerintah : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR								
C.3	:3 ID Subunit Organisasi :								
C.4 Tanggal :			1 3	1 3 dd 0 4 mm 2 0 2 2 yyyy					
C.5 Nama Penandatangan : <u> </u>			HARI	HARI JUMADI					
C.6 F	Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.								
				i dengan ketentuan yang nik sehingga tidak diperl	berlaku, Direktorat Jenderal Pajak ukan tanda tangan.	mengatur bahwa d	dokumen ini tel	ah ditandatangani secara	

PEYTCG72